

Asesmen Nasional sebagai Pilihan Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional

National Assessment as a Choice of Evaluation to National Education System

Yulia Indahri

yulia.indahri@dpr.go.id

Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270

Naskah diterima: 3 Agustus 2020 | Naskah direvisi: 15 November 2021 | Naskah diterbitkan: 31 Desember 2021

Abstract: *On September to November 2021, the government conducted a National Assessment (NA) as the latest evaluation to national education system. In Indonesia, the education evaluation model has undergone several changes. The most recent one, the National Examination (NE), which was still the only national student evaluation for primary and secondary school students had to be canceled in 2020 due to the pandemic. The results of the NA will be a baseline of the service and performance of each school participating in NA. Next step would be a joint reflection to accelerate the improvement of the quality of education. This paper tried to determine whether NA would be a sound decision in present day educational system evaluation. A literature review is expected to describe the dynamics and complement the academic study of the implementation of educational evaluation in a new format. From the long journey of education evaluation, all stakeholders can learn so that education evaluation does not fall back into the same trap of results-oriented without paying any attention to the process. Cost, coverage area, government's commitment as the provider, and evaluation results for the development of education units are important factors indicating that NA can be accepted as a choice taken into account from the various options available. Evaluation of the implementation of NA needs to be reported on time and accessible to the public so that any efforts could be made to resolve current and identified education problems as well as to follow the ideal of national education.*

Keywords: *education evaluation; national assessment; national examination*

Abstrak: Di bulan September–November 2021, pemerintah melaksanakan Asesmen Nasional (AN) sebagai evaluasi mutakhir terhadap sistem pendidikan nasional. Model evaluasi pendidikan di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir di tahun 2020, Ujian Nasional (UN) yang masih menjadi satu-satunya upaya evaluasi siswa secara nasional di akhir jenjang pendidikan dasar dan menengah harus dihapuskan karena pandemi. Hasil AN akan menjadi cermin atau potret layanan dan kinerja setiap sekolah untuk selanjutnya secara bersama-sama dapat dilakukan refleksi guna mempercepat perbaikan mutu pendidikan. Tulisan ini akan melihat apakah AN merupakan pilihan tepat untuk mengevaluasi sistem pendidikan saat ini. Studi literatur diharapkan dapat menggambarkan dinamika dan melengkapi studi pelaksanaan evaluasi pendidikan dalam format baru yang sebelumnya tidak pernah digunakan di Indonesia. Dari perjalanan panjang evaluasi pendidikan, semua pemangku kepentingan

dapat belajar agar evaluasi pendidikan tidak kembali terjebak hanya untuk mengejar hasil, tanpa menghiraukan proses. Faktor biaya, luas cakupan, komitmen pemerintah sebagai penyelenggara, dan hasil evaluasi untuk pengembangan satuan pendidikan menjadi faktor penting yang menunjukkan bahwa AN dapat diterima sebagai pilihan yang perlu diperhitungkan dari beragam pilihan yang ada. Evaluasi pelaksanaan AN perlu disampaikan secara cepat dan dapat diakses oleh publik agar masalah pendidikan yang teridentifikasi saat ini dapat segera dimulai untuk diselesaikan dan cita-cita pendidikan nasional dapat diwujudkan.

Kata Kunci: asesmen nasional; evaluasi pendidikan; ujian nasional

Pendahuluan

Sejak Desember 2019, dalam momen politis Rapat Kerja dengan DPR RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud, setelah April menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi [Mendikbudristek]) telah menyampaikan rencana penghapusan Ujian Nasional (UN). Gu-na memberikan perlindungan terhadap siswa dari wabah Covid-19, pemerintah memutuskan untuk meniadakan UN 2020 di jenjang pendidikan dasar dan menengah (Yossihara, 2020). UN ditiadakan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI). Kelulusan siswa sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dimungkinkan berdasarkan hasil ujian secara *online* yang dilaksanakan oleh sekolah atau cukup dengan melihat nilai lima semester sebelumnya. Selanjutnya, pada 2021, Mendikbudristek melaksanakan Asesmen Nasional (AN). AN terdiri dari tiga bagian, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar (Albertus, 2021).

AKM diikuti oleh siswa dan dirancang untuk mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Kedua aspek kompetensi minimum tersebut menjadi syarat bagi siswa untuk berkontribusi di masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karier yang ingin mereka tekuni di masa depan. Survei Karakter diikuti oleh siswa dan guru, untuk mengukur sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai sebagai hasil belajar nonkognitif. Survei dirancang untuk mengu-

kur capaian siswa dari hasil belajar sosial-emosional berupa pilar karakter untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong-royong, bernalar kritis, dan kreatif. Survei Lingkungan Belajar diikuti oleh kepala sekolah, untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Survei dilaksanakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah (Pusat Asesmen dan Pembelajaran [Pusmenjar], 2021).

Profil Pelajar Pancasila yang ingin diwujudkan oleh pendidikan Indonesia merupakan gambaran ideal pelajar untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul (Samekto, 2021). Konsep SDM unggul yang ingin dicapai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek, sebelum April 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [Kemendikbud]) adalah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Karena itu, pengembangan SDM harus bersifat holistik dan tidak terfokus pada kemampuan kognitif saja. Rujukan pada Pancasila dinilai tepat oleh Samekto (2021) sebagai komitmen pemerintah untuk mengurangi, bahkan menghapuskan, tiga masalah besar yang masih ditemui di dunia pendidikan, yaitu intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan.

AN diselenggarakan sebagai pemetaan dasar dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan sehingga tidak ada konseku-

ensi bagi sekolah dan siswa atas hasil asesmen (Pusmenjar, 2021). Hasil AN menjadi cermin atau potret layanan dan kinerja setiap sekolah untuk selanjutnya secara bersama-sama dapat dilakukan refleksi untuk mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Tetapi dalam momen politis beberapa kali Rapat Kerja, Kemendikbudristek belum menyampaikan momen akademik, momen riset yang melandasi munculnya usulan kebijakan AN.

Mendikbud dalam Rapat Kerja di bulan Januari 2021 memutuskan untuk menunda pelaksanaan AN yang rencananya akan diselenggarakan mulai Maret 2021, menjadi September–Oktober 2021 (Mediana, 2021). Alasan diundurnya jadwal pelaksanaan AN tersebut adalah untuk memastikan persiapan logistik, infrastruktur, dan protokol kesehatan yang lebih optimal. Selain itu, waktu yang masih tersisa digunakan untuk menyosialisasikan dan berkoordinasi lebih masif dengan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan AN.

Mendikbud menjelaskan, pada Maret–April 2021 Kemendikbud melaksanakan tahapan rapat koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan teknis persiapan AN. Selanjutnya pada April–Agustus 2021 dilakukan simulasi AN di sekolah. Melihat kenyataan di lapangan yang sangat dipengaruhi pandemi Covid-19, pelaksanaan AN menyesuaikan kebijakan yang ada, yaitu sampai November 2021 (tetap dimulai di September). Hasil AN diumumkan pada Desember 2021. Prinsip yang dipegang adalah pelaksanaan AN satu tahun sekali dan harus tetap menjaga keamanan dan keselamatan warga sekolah. Oleh karena itu, skema pelaksanaan disusun lebih adaptif sesuai dengan kondisi pandemi di setiap daerah (Napitupulu, 2021).

AN tidak sama dengan UN, baik dari sisi fungsi maupun substansi. AN dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan, serta memperbaiki sistem pendidikan dasar dan menengah. AN bukan sistem evaluasi untuk individu siswa karena evaluasi kompetensi siswa menjadi

tanggung jawab guru dan sekolah. AN juga tidak akan menambah beban siswa karena tidak memiliki konsekuensi bagi siswa dan tidak menjadi syarat dalam penerimaan siswa baru (PPDB). Penyelenggaraan AN di tahun 2021 mempunyai makna penting karena di tahun 2020 sudah tidak ada UN dan sejak pandemi belum ada data lengkap yang dapat dijadikan dasar untuk mengetahui *learning outcome* dan seberapa besar *gap loss* yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Pemerintah tidak akan bisa mengetahui mana sekolah dan daerah yang paling tertinggal jika AN 2021 tidak dilaksanakan.

Sebenarnya sudah ada potret pendidikan Indonesia berdasarkan data skala nasional maupun internasional. Seperti disadari bersama, potret tersebut masih mencerminkan rendahnya hasil belajar siswa karena proses pembelajaran dan kualitas guru yang juga rendah. Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) hingga UN dapat dijadikan data awal untuk mengetahui potret pendidikan tersebut untuk tingkat nasional. Perbandingan dengan siswa di negara lain dapat dilihat dari hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) dan *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) yang sudah beberapa kali diikuti Indonesia. Sejak awal disampaikan rencana AN, sudah banyak terjadi kesimpangsiuran. Di lapangan, sosialisasi Kemendikbudristek juga lemah sampai muncul persepsi bahwa AN sama dengan UN. Melihat banyaknya kritik dan kesimpangsiuran persiapan pelaksanaan AN, maka kajian ini akan mencoba menjawab pertanyaan apakah AN menjadi pilihan tepat dalam evaluasi sistem pendidikan nasional? Pertanyaan muncul karena sebelumnya sudah ada model evaluasi nasional yang cenderung mendorong perankingan. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan ditelusuri sejak mulai adanya ujian di tingkat nasional di tahun 1950an.

Kajian ini menggunakan studi literatur dari buku dan artikel jurnal mengenai asesmen sebagai bagian dari evaluasi, baik

nasional maupun internasional, menjadi bagian penting dari tulisan ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi, yaitu dengan mengelompokkan data agar dapat ditemukan pola sejenis sehingga dapat diambil kesimpulan.

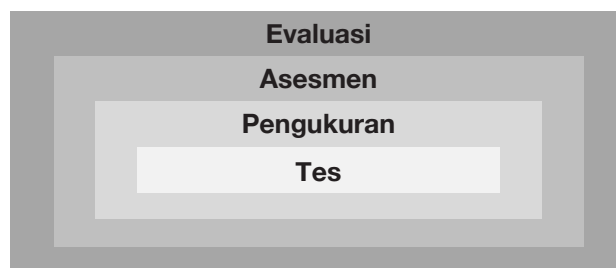
Informasi dari media massa nasional yang mengangkat tema AN sebagai kebijakan baru bagian dari Merdeka Belajar menjadi bagian yang tidak hanya melengkapi, tetapi juga memperjelas arti penting perjalanan evaluasi. Informasi ilmiah dan semi-ilmiah dalam kurun waktu tidak lebih dari lima belas tahun tersebut diharapkan dapat menggambarkan berbagai pertimbangan diubahnya pilihan evaluasi pendidikan yang terkadang memakan waktu sangat lama. Masih jarang tulisan terutama buku terbitan nasional mengenai AN dalam kurun waktu lima tahun terakhir di antaranya memperlihatkan bahwa *stakeholders* pendidikan nasional masih berusaha menyesuaikan diri dengan kurikulum terakhir. Sampai 2020, salah satu tolok ukur keberhasilan Kurikulum 2013 adalah UN. Studi ini juga diharapkan dapat memperkaya momen riset yang mendampingi pelaksanaan momen politik pada saat DPR RI, khususnya Komisi X, berdiskusi lebih lanjut dengan Kemendikbudristek mengenai pendidikan secara umum.

Keputusan kebijakan tidak lagi menyelonggarkan UN sebenarnya sudah sesuai dengan harapan banyak pihak, tetapi belum didukung studi yang dapat dipahami bersama. AN belum secara jelas dipahami masyarakat, terutama mengingat soal AN akan sangat berbeda dengan soal UN. Walaupun dikatakan tidak akan menambah beban siswa, tetapi perbedaan model soal perlu diperkenalkan sehingga siswa maupun pendidik dan tenaga kependidikan dapat lebih menyiapkan diri.

Asesmen Pendidikan

AN adalah bagian dari evaluasi pendidikan, sejajar kedudukannya dengan ujian-ujian sebelumnya. Konsep asesmen pendidikan dalam sistem pendidikan nasional ti-

dak bisa dilepaskan dari konsep tes, pengukuran, dan evaluasi. Keempat konsep tersebut memiliki makna yang berbeda-beda, tetapi saling berkaitan dalam kerangka besar evaluasi pendidikan. Visualisasi dari keterkaitan tersebut dapat dilihat di Bagan 1.



Bagan 1. Keterkaitan Konsep Asesmen dalam Sistem Evaluasi

Sumber: Diolah dari Gabel (1993, dalam Wulan, 2021: 9); Lynch (2001, dalam Adom, Mensah, & Dake, 2020: 110)

Konsep asesmen berdasarkan Bagan 1 memperlihatkan bahwa ada konsep pengukuran dan tes di dalam asesmen. Evaluasi dalam kerangka besar dapat dilaksanakan dengan lebih baik jika kegiatan asesmen telah dilakukan. Kualitas asesmen ditentukan oleh kegiatan pengukuran, yang salah satu bentuknya adalah tes. Untuk memahami asesmen, maka perlu ada pemahaman mengenai tes dan pengukuran terlebih dahulu, sebelum selanjutnya melihat makna umum dari evaluasi.

Tes

Salah satu alat evaluasi yang paling umum digunakan dalam pendidikan adalah tes. Dua pemahaman umum mengenai tes adalah tes sebagai instrumen alat ukur dan tes sebagai prosedur yang digunakan untuk mengukur. Bentuk umum dari tes sebagai instrumen adalah beragam alat ukur, seperti timbangan, termometer, barometer, higrometer, dan *stopwatch* (Nasution, 2008: 1.6). Instrumen tersebut disesuaikan dengan kebutuhan sehingga pengguna tes perlu memilih secara tepat instrumen apa yang digunakan untuk menilai (Tritschler, 2000 dalam Adom, Mensah, & Dake, 2020: 111).

Selain sebagai instrumen, tes juga merupakan prosedur standar yang digunakan untuk mengukur secara sistematis sampel perilaku dengan mengajukan serangkaian pertanyaan atau melakukan serangkaian observasi. Tes sebagai prosedur digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta tes dalam menyelesaikan tugas (Miller, Linn, & Gronlund, 2009: 28). Prosedur dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk nilai terhadap pemahaman akan konsep tunggal maupun konsep jamak sesuai keinginan penilai (Braun, Kanjee, Bettinger, & Kremer, 2006: 9). Tes mata pelajaran sebagai sebuah prosedur dicirikan dengan adanya penguasaan keterampilan atau pengetahuan terhadap isi pelajaran.

Tes dapat berbentuk pilihan ganda atau isian, dengan jawaban berbentuk tulisan, lisan, atau perbuatan. Tes dirancang untuk mengukur kualitas, kemampuan, keterampilan atau pengetahuan sampel terhadap standar yang diberikan, dengan penilaian akhir dapat diterima (memenuhi standar minimal penilaian) atau tidak. Artinya, apabila suatu pertanyaan atau tugas tidak menuntut jawaban atau cara pengerjaan yang benar dan tidak ada nilai di dalamnya, maka pertanyaan atau tugas tersebut bukan sebuah tes. Menurut Rothner (1968: 680–686) beberapa bentuk tes yang dapat digunakan untuk menilai siswa adalah tes standar, tes diagnostik, dan tes buatan guru.

Pengukuran

Berdasarkan tes dan nilai yang didapat dari proses tes, maka pengukuran sangat berkaitan dengan data kuantitatif yang berasal dari nilai tes. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan satu atau beberapa instrumen tes, yang terkadang juga menggunakan skala penilaian. Di dunia pendidikan, pengukuran merupakan proses yang digunakan untuk mengukur (kuantitatif) tingkat kompetensi siswa. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui perbandingan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki dan diperoleh satu siswa terhadap siswa lainnya.

Bradfield dan Moredock (1957) seperti dikutip Tripathi dan Kumar (2018: 12) menyatakan bahwa pengukuran adalah proses pemberian simbol pada dimensi suatu fenomena untuk mengkarakterisasi status fenomena tersebut setepat mungkin. Pengukuran terhadap suatu fenomena atau variabel dilakukan dengan mengelompokkan variabel tersebut ke beberapa tolok ukur yang tepat dan terukur. Skala kuantitatif dengan sistem angka diperlukan agar nilai yang didapat dari tes dan penugasan lain yang bukan tes (tidak ada nilainya) dapat dikelompokkan berdasarkan aturan atau formulasi yang jelas secara berjenjang.

Scriven (1981: 93) berpendapat bahwa pengukuran bukanlah model evaluasi yang paling menentukan walaupun hasilnya berasal dari sekumpulan tes kuantitatif. Selain tes, instrumen pengukuran dapat juga berbentuk kuesioner yang tetap perlu dikalibrasi atau divalidasi. Walaupun pengukuran besar perannya dalam sebuah evaluasi, tetapi sebaiknya tidak menjadikan pengukuran sebagai sumber utama dalam menarik kesimpulan. Pengukuran di dunia pendidikan dapat berarti prosedur standar dan prinsip-prinsip yang mendasari penerapan prosedur pelaksanaan tes.

Asesmen

Penilaian dalam skala besar pendidikan sebelum evaluasi adalah asesmen pendidikan. Asesmen merupakan istilah yang kurang dikenal secara umum (Wulan, 2012: 1). Pada dekade delapan puluhan dan sembilan puluhan, sebenarnya sudah banyak literatur luar yang mendiskusikan istilah asesmen (Nasution, 2008: 1.9). Pengistilahannya pun beragam dan sering disamakan dengan evaluasi, mulai dari *appraisal*, analisis, kritik, *examination*, *grading*, *inspection*, *judgement*, *rating*, *ranking*, bahkan *reviu* (Adom *et al.*, 2020: 111).

Asesmen menurut Stiggins (1998: 2–3) diartikan sebagai evaluasi proses, kemajuan, dan hasil belajar siswa. Kumano (2001, dalam Wulan, 2012: 2) mengartikan ases-

men sebagai proses pengumpulan data yang memperlihatkan perkembangan pembelajaran. Stock *et al.* (1987: 294) biasa menghubungkan asesmen dengan kemampuan seseorang, seperti kecerdasan, keterampilan, kecepatan, dan juga ketepatan, dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya. Di dunia pendidikan, asesmen merupakan evaluasi proses dan kemampuan belajar siswa. Asesmen dapat memberikan umpan balik secara berkesinambungan tentang siswa untuk perbaikan pembelajaran.

Evaluasi

Evaluasi secara sederhana diartikan sebagai penilaian atau penentuan kualitas atau nilai suatu objek, subjek, atau fenomena. Di bidang pendidikan, evaluasi menurut Coleman (2001) dalam Adom *et al.* (2020: 111) adalah penentuan keberhasilan suatu program, suatu kurikulum, atau serangkaian uji coba yang mengacu pada tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.

Braun *et al.* (2006: 9) selanjutnya mena- warkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dimungkinkan untuk tidak mempunyai wujud atau hanya merupakan konsep abstrak. Wujud abstrak di antaranya adalah kurikulum dan penguatan kelembagaan. Dari target alternatif yang abstrak dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses mendapatkan informasi yang nantinya digunakan sebagai dasar menilai situasi.

Selain alternatif target atau tujuan akhir, Singh (2018: 16) berpendapat bahwa evaluasi dalam pendidikan bertujuan untuk mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penyusunan rencana pendidikan secara nasional. Rencana disusun dengan memperhatikan target waktu, laju pertumbuhan siswa, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai sosial yang diinginkan. Bagi guru, evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki teknik pembelajaran, memilih sumber belajar yang sesuai, dan memotivasi siswa untuk terus belajar.

Negara memberikan mandat kepada pemerintah dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) untuk melakukan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan melalui evaluasi terhadap berbagai komponen pendidikan. Program evaluasi skala nasional dan internasional, standar nasional dan internasional, serta kompetisi global menjadi pendorong meningkatnya kebutuhan akan asesmen pendidikan. Tes berbasis komputer dan juga tes dalam jaringan (*online*) sudah umum ditemui dan digunakan secara global.

Menurut Miller, Linn, dan Gronlund (2009: 4) ada empat faktor yang menyebabkan asesmen lebih menarik dibandingkan evaluasi dan program lainnya. *Pertama*, asesmen tidak memakan biaya tinggi. Dibandingkan dengan mengubah model pembelajaran, mengurangi rombongan belajar, merekrut guru lebih banyak, atau perubahan lain yang dilakukan untuk mengembangkan profesi guru, asesmen tidak memakan biaya besar. *Kedua*, asesmen dapat diatur dalam sebuah peraturan. Terbukti, untuk saat ini sudah ada peraturan khusus tentang AN. *Ketiga*, perubahan evaluasi, yaitu pemberlakuan AN dapat segera dilakukan jika pimpinan di kementerian terkait, Mendikbudristek, berkomitmen untuk menyukseskan AN. *Keempat*, hasilnya dapat dilihat dengan segera. Hasil yang masih belum dapat dibuktikan untuk AN, karena hasil AN paling cepat baru disampaikan kepada sekolah dan dinas terkait menjelang akhir tahun 2021.

Penjabaran mengenai beragam bentuk evaluasi memperlihatkan bahwa AN dapat menjadi salah satu pilihan di tengah permasalahan nasional yang sedang terjadi. Faktor biaya, luas cakupan, komitmen penyelenggara, dan hasil yang memang sangat diperlukan untuk mengevaluasi proses pendidikan. Proses yang sejak awal pandemi satu setengah tahun lalu cenderung melambat dan dikhawatirkan menyebabkan *learning loss*. Pertimbangan tersebut menjadi alasan AN dapat diterima

sebagai pilihan yang perlu diperhitungkan dari beragam pilihan yang ada.

Asesmen Nasional

AN berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Permendikbudristek tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mendelegasikan pengaturan AN di Pasal 46 ayat (8).

PP SNP sempat memunculkan kesimpangsiuran lain dan sempat diajukan untuk direvisi tidak lama setelah diundangkan (Napitupulu, 2021). Pengaturan Permendikbudristek tentang AN memperlihatkan bahwa AN merupakan bagian dari evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Selain di tingkat pusat, sebenarnya pemerintah daerah dan lembaga mandiri diperbolehkan untuk melakukan evaluasi sistem pendidikan.

Di tingkat daerah, praktik baik dicitokan Provinsi D.I. Yogyakarta (DIY) yang mengadakan asesmen tingkat provinsi, yaitu Asesmen Standar Pendidikan Daerah (ASPD) Tahun 2020/2021 untuk kelas IX jenjang SMP/MTs. Asesmen terdiri dari empat mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). ASPD dipergunakan untuk melakukan pemetaan terhadap mutu pendidikan jenjang SMP/MTs di DIY. Walaupun hasil ASPD tidak dipergunakan untuk menentukan kelulusan siswa, namun nilai tersebut menjadi alat seleksi ketika mendaftar di SMA/SMK negeri (Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021).

ASPD yang diselenggarakan pada 5–8 April 2021 diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY dan mendapat-

kan dukungan dari dinas pendidikan kabupaten/kota di DIY. Kebijakan ASPD diambil karena nilai rapor lima semester dirasa belum cukup. Penentuan nilai rapor setiap sekolah berbeda-beda sehingga tidak bisa dijadikan standar untuk seleksi masuk ke jenjang SMA/SMK dan belum bisa digunakan sebagai patokan mutu sebuah sekolah.

Survei Lingkungan Belajar yang merupakan bagian dari AN sebenarnya juga sudah pernah dilaksanakan dengan nama lain, yaitu Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP). Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah mengatur bahwa siklus kegiatan memetakan mutu pendidikan di tingkat sekolah dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh sekolah dan penyelenggara pendidikan (Nanang & Rusman, 2019: 25). Instrumen utama dalam sistem penjaminan mutu adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS adalah proses yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan untuk membantu sekolah dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan indikator kunci yang mengacu pada standar nasional pendidikan (Slameto, 2011: 1).

Salah satu profil pelajar yang ingin dicapai dari penyelenggaraan AN adalah Profil Pelajar Pancasila. Di tahun 2017, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) telah ada upaya Kemendikbud untuk membangun karakter siswa. Semboyan yang diusung pada saat itu adalah “Senang Belajar di Rumah Kedua”.

Nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam program PPK didasari filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara. Yakni olah hati (etika), olah pikir (literasi), olah karsa (estetika), dan olahraga (kinesetetik). Dari filosofi itu diharapkan muncul nilai-nilai karakter siswa dimulai dari religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kre-

atif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dll. Nilai-nilai yang nantinya akan mengkristalisasi menjadi lima nilai utama, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.

Hasil dari proses tadi adalah individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat (olah pikir), individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa (olah hati), individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan (olah rasa dan karsa), serta individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara (olahraga).

Dari tiga praktik baik tersebut, sebenarnya terlihat bahwa model yang akan digunakan AN tidak sama sekali baru. Sudah ada sekolah yang mencoba melaksanakan AKM walaupun hanya di tingkat provinsi. Sudah banyak sekolah yang pernah melakukan EDS yang hampir serupa dengan Survei Lingkungan Belajar. Sudah ada pengalaman memperkenalkan profil pelajar ideal yang tidak berbeda dengan Profil Pelajar Pancasila. AN bukan evaluasi yang benar-benar baru, karena sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang dapat memperbaiki penerapan evaluasi sistem pendidikan di masa yang akan datang.

Proses Menuju AN untuk Evaluasi Sistem Pendidikan

Sistem evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa sudah berulang kali berubah sejak zaman Orde Lama hingga era Reformasi. Beragam evaluasi yang pernah diselenggarakan sebelumnya ditentukan dari pusat, harus diikuti oleh semua siswa, dan mengukur semua konten kurikulum yang tertuang dalam mata pelajaran. Akibatnya, pembelajaran terfokus pada banyak materi, tetapi tidak mendalam.

Padahal yang paling memahami proses dan hasil belajar siswa adalah guru. Pemerintah sangat terbatas daya jangkauannya dalam mengetahui siswa mana yang sudah menguasai seluruh konten kurikulum. Ujian yang rerata berlangsung selama dua jam akan sulit menilai penguasaan konten yang diajarkan selama tiga tahun. Perjalanan panjang ujian dan evaluasi nasional yang pernah dilakukan didasarkan pada kesadaran bahwa evaluasi nasional tetap harus ada dan dilaksanakan secara berkala.

Model Ujian

Dalam sejarahnya, ujian secara nasional mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1950. Format telah berganti beberapa kali serta mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Di tahun 1950–1964, ujian nasional disebut dengan Ujian Penghabisan. Saat itu materi ujian dalam format esai dan isian dibuat Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Hasil ujian tidak diperiksa di sekolah, tetapi di pusat rayon (Pancawati, 2019). Pada periode tersebut Menteri Pendidikan dijabat oleh Sarmidi Mangunsarkoro, Bahder Djohan, Wongsonegoro, Mohammad Yamin, Soewandi Notokoesoema, dan Prijono (Suwarta, 2019).

Di tahun 1965–1971 ujian penghabisan berganti nama menjadi Ujian Negara, yang waktu dan materi ujiannya ditentukan pemerintah pusat. Semua mata pelajaran di sekolah masuk dalam materi ujian. Tujuan ujian adalah untuk menentukan kelulusan sehingga siswa dapat melanjutkan ke sekolah negeri atau perguruan tinggi negeri apabila telah lulus Ujian Negara. Sementara itu, bagi yang tidak lulus Ujian Negara tetap memperoleh ijazah dan dapat melanjutkan ke sekolah atau perguruan tinggi swasta (Pancawati, 2019).

Bahan ujian dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Sistem ujian menuai protes karena dirasakan adanya ketidakadilan, terutama bagi sejumlah provinsi di luar Jawa.

Materi ujian sama, tetapi tenaga pengajar dan sarana pendukung pendidikan sangat berbeda. Pejabat Menteri Pendidikan pada saat itu adalah Sarino Mangunpranoto, Sanusi Hardjadinata, dan Mashuri Saleh (Suwarta, 2019).

Sistem ujian akhirnya diubah. Pemerintah menyelenggarakan ujian nasional di sekolah masing-masing di tahun 1972–1979. Pemerintah memberikan kelonggaran dalam penentuan kelulusan. Pembuatan soal dan evaluasi dilakukan sekolah masing-masing. Pemerintah pusat hanya menyusun pedoman dan panduan yang bersifat umum. Menteri Pendidikannya kala itu adalah Sumantri Brodjonegoro dan Syarif Thayeb (Suwarta, 2019).

Hasilnya, tingkat kelulusan meningkat, tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan mutu dalam proses belajar, baik metode mengajar maupun penguasaan materi. Protes masyarakat pun kembali muncul. Menyadari kekeliruannya, pemerintah mengubah kembali sistem ujian akhir (Pancawati, 2019).

Pada periode 1980–2001 ujian nasional disebut dengan nama Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas) dan Evaluasi Belajar Tahap Akhir (Ebta). Ebta mengujikan berbagai mata pelajaran non-Ebtanas. Tujuan Ebtanas adalah mengendalikannya, mengevaluasi, dan mengembangkan mutu pendidikan. Dalam melaksanakan Ebtanas, sekolah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Untuk Ebta, koordinasi sekolah adalah dengan pemerintah provinsi (Suwarta, 2019).

Kelulusan siswa ditentukan oleh kombinasi hasil Ebta dan Ebtanas ditambah nilai ujian harian pada rapor. Muncullah istilah Nilai Ebtanas Murni (NEM). Siswa dinyatakan lulus Ebtanas jika meraih nilai rerata untuk semua mata pelajaran yang diujikan minimal enam, meskipun ada nilai di bawah tiga. Tingkat kelulusan tetap sama dengan metode sebelumnya, yaitu hampir 100 persen (Pancawati, 2019).

Peranan sekolah dalam menentukan kelulusan memberikan peluang terjadinya

markup atau pengontrolan nilai. Realitas yang berdampak pada makin terpuruknya mutu pendidikan secara nasional. Kembali, model evaluasi belajar menuai kritik. Model Ebta dan Ebtanas dianggap tidak mendorong siswa belajar sungguh-sungguh. Sekolah juga tidak berusaha meningkatkan mutu guru. Kata evaluasi dalam Ebtanas juga diperdebatkan (Pancawati, 2019).

Ebtanas merupakan sistem evaluasi akhir kelulusan siswa yang paling lama bertahan, yaitu selama 21 tahun. Ujian dilakukan sekolah dan dikombinasikan dengan ujian yang diselenggarakan oleh negara. Menteri Pendidikan pada masa-masa tersebut adalah Daoed Jusuf, Nugroho Notosusanto, Fuad Hassan, Wardiman Djojonegoro, Wiranto Arismunandar, Juwono Soedarsono, dan Yahya Muhaimin (Suwarta, 2019).

Pada periode 2002–2004 ujian nasional disebut dengan Ujian Akhir Nasional (UAN) yang mengganti Ebtanas dan Ebta. Departemen Pendidikan Nasional kembali bertanggung jawab atas pembuatan soal ujian, khususnya untuk tiga mata pelajaran, yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Kewenangan negara dalam menentukan kelulusan lebih sedikit daripada kewenangan pihak sekolah (Pancawati, 2019).

Nilai ujian mengacu pada nilai mata pelajaran setiap siswa. Siswa yang tidak lulus UAN pun dapat mengikuti ujian ulang. Kelemahannya, sekolah lebih fokus pada tiga mata pelajaran yang diujikan dan cenderung mengabaikan mata pelajaran lain. Saat periode tersebut Menteri Pendidikan dijabat Abdul Malik Fajar dan Bambang Sudibyo (Suwarta, 2019).

Sejak UAN 2003 mulai diterapkan standar kelulusan, yaitu 3,01 pada setiap mata pelajaran dan nilai rerata minimal 6,00. Pada UAN 2004, nilai minimal setiap mata pelajaran sebagai standar kelulusan siswa dinaikkan menjadi 4,01 dan tidak ada nilai rerata minimal. Siswa yang tidak/belum lulus masih bisa mengikuti ujian ulang (Pancawati, 2019).

Selanjutnya, di tahun 2005–2012, untuk pertama kalinya istilah UN diperkenalkan di bawah Menteri Pendidikan Muhammad Nuh. UN menggantikan UAN dan menjadi syarat kelulusan (Suwarta, 2019). Standar kelulusan pun berbeda setiap tahun. Untuk memacu semangat belajar dan meningkatkan mutu standar nilai, setiap tahun standar kelulusan dinaikkan.

Standar tertinggi adalah 5,5 pada tahun 2012. Tingkat kesulitan juga ditingkatkan. Selain itu, tidak ada ujian ulang bagi siswa yang tidak lulus. Diharapkan jika dilakukan secara konsisten, standar nilai kelulusan siswa di Indonesia terus meningkat dan tidak tertinggal dari negara lain (Pancawati, 2019). Namun, hasilnya, persentase kelulusan siswa menurun, tidak mencapai 100 persen. Muncul banyak daerah dengan angka ketidakkelulusan tinggi. Dampaknya, setiap penyelenggaraan UN selalu diwarnai persoalan, mulai dari kebocoran soal dan kunci jawaban, kecurangan massal, perjokian, stres, hingga terjadinya penyimpangan tujuan UN ke ranah politik. Upaya meningkatkan mutu pendidikan mengalami hambatan karena pihak terkait terus berusaha mendongkrak nilai UN (Pancawati, 2019).

Pada 2014, terjadi perubahan model UN karena untuk pertama kalinya di bawah Menteri Pendidikan Anies Rasyid Baswedan, Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dilakukan. UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan. Ditetapkan saat itu bahwa lulus atau tidaknya seorang siswa, akan dinilai oleh sekolahnya (Ujian Sekolah, US). Jika sekolah menyatakan lulus, maka siswa tersebut akan mendapatkan sertifikat dari negara (Suwarta, 2019).

Di tahun 2014 juga UNBK diujicobakan secara *online* dan terbatas di SMP Indonesia Singapura dan SMP Indonesia Kuala Lumpur (SIKL). Hasil penyelenggaraan UNBK pada kedua sekolah tersebut cukup menggembirakan dan makin mendorong untuk meningkatkan literasi siswa terhadap teknologi informasi dan komunikasi (Putri, 2018).

Secara bertahap mulai 2015 dilaksanakan rintisan UNBK dengan mengikutsertakan sebanyak 556 sekolah yang terdiri dari 42 SMP/MTs, 135 SMA/MA, dan 379 SMK di 29 provinsi dan luar negeri. Jumlah sekolah Indonesia di luar negeri yang menggunakan sistem UNBK bertambah menjadi 28 sekolah. Sekolah tersebut berada di 10 negara yaitu Rusia, Belanda, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Jepang, Filipina, Saudi Arabia, dan Mesir (Putri, 2018). Siswa yang ikut serta dalam UNBK berjumlah 170.578 siswa.

Selanjutnya di tahun 2016, UNBK mengikutsertakan sebanyak 4.382 sekolah yang terdiri dari 984 SMP/MTs, 1.298 SMA/MA, dan 2.100 SMK. Jumlah siswa yang mengikuti UNBK mencapai 922.447 siswa. Jumlah siswa yang mengikuti UNBK 2017, pada tahun berikutnya, mencapai 3.659.696 siswa. Sekolah yang mengikuti UNBK melonjak tajam menjadi 30.577 sekolah yang terdiri dari 11.096 SMP/MTs, 9.652 SMA/MA dan 9.829 SMK.

Meningkatnya jumlah sekolah UNBK pada tahun 2017 seiring dengan kebijakan *resources sharing* yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yaitu memperkenankan sekolah yang sarana komputernya masih terbatas melaksanakan UNBK di sekolah lain yang sarana komputernya sudah memadai (Kemendikbud, 2019a). Ketika Kemendikbud dipimpin oleh Muhadjir Effendy, UN kembali tidak menjadi salah satu ukuran keberhasilan siswa.

Jumlah siswa yang mengikuti UNBK pada 2018 sebanyak 6.293.552 peserta atau meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 78 persen siswa mengikuti UNBK, yang berada 69.081 sekolah (BSNP, 2018). Peserta UNBK kembali meningkat menjadi 91 persen dari total peserta UN. Jumlah peserta UNBK 2019 mencapai 7.507.116 siswa. Terakhir, peserta UNBK mencapai 8,2 juta siswa, dari 103 sekolah. Persentase siswa yang mengikuti UNBK mencapai 96,16 persen (Kemendikbud, 2019b).

Perubahan sistem terus dilakukan, dan sejak dulu selalu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jika didasarkan pada penyebutan saja, maka akan terlihat perbedaan penyelenggara ujian secara nasional sejak Indonesia berdiri. Ujian dan evaluasi merupakan dua istilah yang sering dimaknai sama tidak hanya oleh masyarakat awam, tetapi juga oleh praktisi pendidikan. Kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai makna yang berbeda. Ada penyelenggaraan yang sepenuhnya diserahkan ke pemerintah dan ada penyelenggaraan yang menggabungkan peran pemerintah dan sekolah. Dalam praktiknya, materi yang diujikan pun mengalami perubahan, mulai dari seluruh mata pelajaran, sampai dengan mata pelajaran tertentu yang dinilai mewa-

kili kebutuhan pengembangan pendidikan. Ada yang sangat ketat pengaturannya, dan ada yang begitu longgar sehingga peserta ujian dapat diwakilkan dan mengulang (Indahri, 2016: 10).

Pro dan Kontra

DPR RI melalui Komisi X mendukung rencana Mendikbud untuk menghapus UN mulai 2021. Namun, DPR RI menganggap masih banyak hal yang perlu dibenahi dari sistem pendidikan Indonesia. Ada beberapa saran yang disampaikan setiap fraksi kepada Kemendikbud sejak awal penghapusan UN disampaikan. Irfany (2019), merangkum saran dan masukan dari setiap Fraksi seperti terlihat di Tabel 1.

Tabel 1.
Saran dan Masukan Fraksi DPR RI mengenai Penghapusan UN

Fraksi	Alasan Mendukung Penghapusan UN	Tindak Lanjut	
		Pengganti UN	Kementerian/ Pemerintah
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	UN tidak mengasah kemampuan nalar.		<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun cetak biru pembenahan pendidikan nasional. - Meningkatkan kualitas guru dan infrastruktur pendidikan.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Perubahan paradigma pelaksanaan pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menjabarkan penilaian kompetensi siswa. - Memperhatikan kebutuhan dunia kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas guru dan infrastruktur pendidikan. - Menerapkan standar pendidikan siswa nasional. - Perlakuan yang setara terhadap sekolah swasta dan negeri.
Fraksi Partai Golkar	UN dapat merusak mental murid karena pada praktiknya menyusupkan nilai-nilai koruptif.		<ul style="list-style-type: none"> - Menyederhanakan kurikulum pendidikan dan mata pelajaran. - Mengarusutamakan pendidikan vokasi. - Pemerataan guru di daerah terpencil melalui rotasi setiap 6 bulan.

Fraksi	Alasan Mendukung Penghapusan UN	Tindak Lanjut	
		Pengganti UN	Kementerian/ Pemerintah
Fraksi Partai Gerindra		Dipercepat.	- Menghindari penilaian subjektif dari guru. - Membangun karakter siswa lewat kegiatan di sekolah.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Penyeragaman pendidikan tidak sesuai dengan karakter bangsa.	Mempertimbangkan minat dan bakat siswa.	Hasil penilaian harus digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
Fraksi Partai Amanat Nasional	UN melahirkan budaya ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan.	Mempertimbangkan minat dan bakat siswa.	Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran bukan sekadar perbaikan penilaian.
Fraksi Partai NasDem	UN belum memperlihatkan hasil pembangunan karakter.		Pembangunan karakter seharusnya diterapkan pada guru dan siswa.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	UN belum menjadi alat evaluasi penyusunan kebijakan pendidikan.		- Penilaian kompetensi harus menjadi alat evaluasi terhadap penyusunan peta jalan pembenahan pendidikan jangka panjang. - Menghapus Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sumber: Irfany, 2019

Kesimpulan dari berbagai saran yang terlihat di Tabel 1 tersebut adalah adanya dua perspektif penyelenggaraan AN. Pendukung AN menganggap UN tidak menguntungkan bagi upaya peningkatan mutu pendidikan dan kualitas siswa. UN perlu ditinjau pelaksanaannya karena arah proses belajar siswa tidak tepat yaitu lebih mengutamakan mengejar hasil UN. Bimbingan belajar persiapan UN bermunculan, pembangunan karakter, perilaku, dan kompetensi siswa terabaikan, dikarenakan proses pembelajaran selama tiga tahun hanya terfokus pada mata pelajaran yang diujikan. Belum lagi keluhan ketika UN mencoba mengenalkan kemampuan berpikir kritis dengan soal-soal *high order thinking skills* di UN 2018 (Napitupulu, 2018).

Pendukung UN tetap melihat ada keuntungan dari pelaksanaan UN, karena dapat memotivasi siswa untuk belajar. Walaupun menjadi momok setiap tahun pelaksanaannya, UN pernah menjadi alat evaluasi mutu pendidikan secara nasional. Evaluasi idealnya memang diselenggarakan setiap tahun sebagai dasar penyusunan kebijakan pendidikan skala nasional di tahun-tahun mendatang. Tetapi pada kenyataannya, UN dalam kurun waktu terakhir terkerdikan perannya hanya sebagai alat ukur hasil belajar siswa dan pada gilirannya meningkatkan citra sekolah (Oktora, 2019a). UN belum secara maksimal dijadikan dasar penyusunan kebijakan pendidikan sehingga UN perlu dihapus dan mulailah diterapkan AN. Dukungan dari pengawas jalannya peme-

rintahan, yaitu DPR yang juga menjadi cerminan suara rakyat, menjadi salah satu alasan sudah dapat dimulainya AN di tahun 2021.

Belajar dari Evaluasi Sistem Pendidikan Level Global

Diskusi di lingkup global, evaluasi sistem pendidikan menekankan pada pencapaian target Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) yang secara luas diartikan sebagai peningkatan kualitas akses pendidikan, kondisi sekolah, dan prestasi siswa (Postlethwaite & Kellaghan, 2008: 9). Beberapa negara telah menggunakan penilaian skala nasional untuk memantau dan mengevaluasi kualitas sistem pendidikan di negaranya. Sama halnya dengan Indonesia, penilaian nasional di negara-negara tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemangku kepentingan yang sangat beragam mengenai informasi kondisi umum sekolah dan kualitas pendidikan sebagai dasar perencanaan kebijakan selanjutnya.

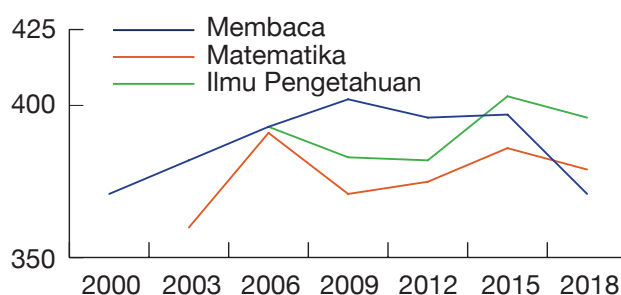
Programme for International Student Assessment (PISA)

Di lingkup global, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menginisiasi asesmen global yaitu PISA. PISA pertama kali diselenggarakan pada tahun 2000 untuk membantu negara-negara yang mengikuti asesmen dalam mempersiapkan SDM agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang diharapkan pasar internasional (Pratiwi, 2019: 51). OECD sebagai organisasi yang mensponsori PISA mengatakan bahwa PISA adalah indikator paling komprehensif dan andal di dunia yang dapat mengukur kemampuan siswa (OECD, 2019: 3).

Subjek asesmen PISA terdiri atas tes literasi dasar dalam bidang membaca, matematika, dan sains. Sasaran hanya diujikan kepada siswa yang berusia 15 tahun melalui *random sampling*. Sasaran subjek dan objek tersebut diyakini oleh seluruh dunia memiliki legitimasi yang kuat dalam

menggambarkan kualitas pendidikan di suatu negara. Respons pengambil keputusan yang cukup berdampak besar adalah menjadikan hasil resmi PISA sebagai dasar penyusunan kebijakan di negara masing-masing (Breakspear, 2014: 3).

Hadirnya PISA di Indonesia diasumsikan akan berdampak pada pergaulan Indonesia di mata internasional. Terutama terkait kerja sama Indonesia dengan negara-negara OECD dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan. Di samping itu, negara-negara yang bekerja sama pun akan terus bersaing untuk mendapatkan pengaruhnya di dunia internasional (Uljens, 2007: 4).



Bagan 2. Hasil Asesmen PISA Indonesia

Sumber: OECD, 2019: 3

Hasil skor PISA Indonesia seperti terlihat di Bagan 2 menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia terlihat stagnan rendah sejak 2000. Skor kemampuan membaca siswa Indonesia pada 2018 (371), misalnya, setara dengan capaian pada 2000, di bawah rerata negara-negara yang tergabung dalam OECD dengan skor maksimal di angka 500 (Arika, 2020). Tetapi sebenarnya, seperti juga diakui PISA, dari hasil PISA 2018 terlihat keberhasilan pemerintah mengekspansi pendidikan melalui peningkatan angka partisipasi siswa. Angka cakupan populasi PISA adalah perbandingan antara jumlah populasi PISA dengan perkiraan total populasi anak-anak usia 15 tahun berdasarkan proyeksi demografi Indonesia.

Peningkatan persentase cakupan menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya untuk membuka kesempatan lebih

luas kepada warga negara usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Cakupan populasi PISA Indonesia terus meningkat dari sebelumnya hanya 39 persen di tahun 2000, menjadi 85 persen di tahun 2018 (Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [Puspendik], 2019: 23). Pencapaian yang diapresiasi PISA karena sebelumnya kurang dari separuh siswa yang mengikuti asesmen PISA. Ketika ada penambahan jumlah siswa sampai lebih dari tiga per empatnya dan nilai rerata capaian PISA tidak mengalami penurunan, maka Indonesia dinilai telah mampu memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas pendidikan (OECD, 2019: 3).

Jika mengacu pada cakupan populasi PISA, maka secara bertahap dalam kurun waktu 18 tahun pemerintah Indonesia telah berhasil meningkatkan akses pendidikan kepada warga negara (paling tidak) untuk bersekolah sampai usia 15 tahun, sebesar 46 persen. Peningkatan tersebut dapat dilihat di Tabel 2.

Tabel 2.
Cakupan Populasi Siswa Indonesia dalam PISA, 2000–2018

Tahun	Cakupan Populasi	
	Persentase	Jumlah Siswa (Juta)
2000	39	1,8
2003	46	2,0
2006	53	2,2
2009	53	2,2
2012	63	2,6
2015	68	3,1
2018	85	3,7

Sumber: Puspendik, 2019: 3

Prestasi tersebut perlu diapresiasi mengingat kondisi geografis Indonesia. Dari PISA juga dapat dipelajari bahwa ada permasalahan kualitas hasil belajar. Baik kualitas secara relevansi maupun kualitas secara umum. Kualitas secara relevan artinya mata pelajaran yang dipelajari dilihat relevansinya dengan kebutuhan hidup.

Sementara kualitas secara umum tergambar dari hasil belajar siswa dan kualitas pendidikan itu sendiri (Puspendik, 2019: 6).

Kritik terhadap PISA

PISA sebagai salah satu model asesmen global tidak luput dari kritik. Di tahun 2014 (untuk pelaksanaan PISA di tahun 2015), lebih dari seratus ilmuwan dunia memohon dilakukan moratorium PISA. Alasan utama permohonan tersebut adalah karena negara peserta PISA mulai terlihat sangat tergantung pada hasil PISA. Kelemahan utama PISA adalah karena beberapa ketidakjelasan, seperti cara asesmen dilaksanakan, penentuan siswa yang menjadi sampel, dan bagaimana proses penyusunan soal tes dilakukan (Strauss, 2019).

Zhao seperti dikutip Strauss (2019) aktif mengkritisi PISA dan menyampaikan bahwa keberhasilan PISA dengan klaim dapat mengukur standar pendidikan negara pesertanya perlu dipertanyakan. *Pertama*, tidak ada bukti pendukung dari klaim bahwa PISA mengukur keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup di era ekonomi modern. PISA berhasil menciptakan ilusi kualitas pendidikan dan memasarkannya ke dunia.

Pada tahun 2018, 79 negara yang ikut serta dalam permainan ilusi PISA meyakini bahwa asesmen tiga tahunan seperti PISA dapat secara akurat mengukur kualitas sistem pendidikan, efektivitas guru, kemampuan siswa, dan jaminan masa depan negara peserta. PISA mengklaim dapat meramalkan sejauh mana siswa berusia 15 tahun, menjelang akhir wajib belajar, telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam peran aktifnya di masyarakat modern (OECD, 2016: 25). Pendekatan yang menunjukkan bahwa negara maju memberi penghargaan kepada individu bukan untuk apa yang mereka ketahui, tetapi untuk apa yang dapat mereka lakukan berdasarkan pengetahuan tersebut.

Kedua, klaim dapat mengukur keterampilan yang dibutuhkan di dunia modern merupakan pemaksaan pendapat terhadap negara peserta PISA. PISA diselenggarakan dengan asumsi bahwa ada seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang secara universal dinilai tinggi di semua masyarakat, tanpa memperhatikan sejarah masa lalu dan harapan di masa yang akan datang dari masing-masing negara peserta. Padahal masing-masing negara memiliki harapan atau tujuan pendidikan sendiri-sendiri yang tertuang dalam peta jalan atau dasar negaranya. Artinya ada asumsi yang diabaikan PISA mengenai keberagaman kondisi masyarakat dunia antarbenua, antarnegara, bahkan antarkelompok masyarakat seperti yang selalu ditemui di Indonesia.

Budaya, politik, agama, dan ekonomi masing-masing masyarakat berbeda kondisinya dan akibatnya tantangan yang dihadapi pun berbeda. Untuk menjawab tantangan yang berbeda dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang juga berbeda. PISA yang dikembangkan oleh negara dengan ekonomi maju yang tergabung dalam OECD akan sulit menetapkan target yang tepat untuk negara di belahan lain dunia. Apa yang menjadi target PISA akan sulit mewakili spektrum keragaman di hampir 200 negara di dunia saat ini.

Ketiga, klaim PISA untuk mengukur standar pendidikan negara peserta asesmen mendistorsi tujuan pendidikan. PISA menjadikan pertumbuhan ekonomi dan daya saing sebagai satu-satunya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, PISA hanya menilai kemampuan membaca, matematika, sains, literasi keuangan, dan pemecahan masalah yang secara umum dipandang penting untuk meningkatkan daya saing dalam ekonomi global. PISA tidak melihat mata pelajaran lain yang juga berperan besar di kurikulum banyak negara seperti humaniora, seni dan musik, pendidikan jasmani, ilmu sosial, bahasa dunia, sejarah, dan geografi (Sjøberg, 2015).

Tujuan pendidikan di banyak negara sangat luas dan lebih dari sekadar mempersiapkan manusia ekonomi. Kewarganegaraan, solidaritas, kesetaraan, kasih sayang, empati, rasa ingin tahu, nilai-nilai budaya, kesehatan fisik dan mental, dan banyak lainnya adalah beberapa tujuan yang sering disebutkan dalam tujuan pendidikan nasional negara-negara di dunia. Tetapi beragam tujuan pendidikan tersebut sering dilupakan atau diabaikan ketika diskusi tentang kualitas pendidikan didasarkan pada skor dan peringkat PISA (Sjøberg, 2015: 113).

Pengembangan Asesmen Nasional Berdasarkan Asesmen Internasional

Indonesia sudah berpartisipasi dalam PISA sejak awal dimulai oleh OECD. Belajar dari PISA, AN akan berfokus pada kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter. Evaluasi dilakukan terhadap siswa yang berada di tengah jenjang sekolah dasar dan menengah. Hasil evaluasi akan mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Target yang memang diharapkan dari pelaksanaan evaluasi pendidikan.

Selain PISA, evaluasi AN mengacu pada tolok ukur yang termuat dalam TIMSS. TIMSS diselenggarakan di 50 negara untuk mengukur kemajuan dalam pembelajaran matematika dan sains. Studi TIMSS diselenggarakan oleh International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), suatu badan internasional untuk menilai prestasi pendidikan. TIMSS berpusat di Lynch School of Education, Boston College, Amerika Serikat (Herman, 2003).

TIMSS dilakukan secara rutin setiap empat tahun sekali, yaitu tahun 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, dan 2015. Selama empat tahun berturut-turut sejak 2003, Indonesia menjadi salah satu negara yang berpartisipasi dalam asesmen tersebut. Tetapi seperti halnya PISA, posisi prestasi

matematika siswa Indonesia masih di bawah standar internasional, seperti dapat dilihat di Tabel 3 (Hadi & Novaliyosi, 2019: 562).

Tabel 3.
Hasil TIMSS Indonesia, 2003–2015

Tahun	Peringkat	Peserta	Rerata Skor Indonesia	Rerata Skor Internasional
2003	35	46 Negara	411	467
2007	36	49 Negara	397	500
2011	38	42 Negara	386	500
2015	44	49 Negara	397	500

Sumber: Hadi & Novaliyosi, 2019: 563

Selain PISA dan TIMSS, Kemendikbud juga menjadikan evaluasi siswa di Finlandia sebagai contoh baik yang dapat diadopsi. Badan Pendidikan Nasional Finlandia menetapkan target-target capaian siswa secara komprehensif di seluruh jenjang pendidikan. Penyusunan kurikulum diserahkan kepada masing-masing sekolah. Sekolah bekerja sama dengan orangtua atau wali siswa untuk mengomunikasikan target tersebut dan mengadakan evaluasi yang berkelanjutan kepada siswa saat belajar di sekolah dan luar sekolah. Siswa berdasarkan bimbingan sekolah dipacu untuk menilai dan mengukur targetnya sendiri (Absawati, 2020: 65).

Penilaian berbasis karya juga sempat mengemuka dalam diskusi pengembangan AN. Sekolah membimbing siswa mengembangkan diri sesuai dengan potensi masing-masing. Kompetensi siswa diarahkan untuk menjawab tantangan-tantangan dalam masyarakat. Pada akhir masa belajar, siswa diminta membuat karya sesuai dengan potensi, misalnya, karya seni dan penelitian sederhana (Asrul, Ananda, & Rosnita, 2014: 37–38).

Indonesia sebenarnya sudah memiliki alat evaluasi sendiri yang dinamakan *Indonesian National Assessment Program* (INAP) atau Program Asesmen Pendidikan Nasional. Evaluasi yang berupaya menjembatani asesmen internasional dengan UN. Perpaduan yang diharapkan mampu mem-

berikan diagnosis keberhasilan sistem pendidikan di suatu wilayah yang berakar dari konteks Indonesia (Hadi & Novaliyosi, 2019: 567).

INAP diinisiasi oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Balitbang Kemendikbud melalui sistem pemantauan mutu yang terlembaga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Survei INAP bersifat “longitudinal” untuk memantau mutu pendidikan secara nasional pada sekolah dari Kelas I s.d. Kelas XII. Berdasarkan survei longitudinal diharapkan akan diperoleh data tentang mutu pendidikan yang valid, tidak hanya menggambarkan pencapaian kemampuan siswa, tetapi juga faktor-faktor yang memengaruhinya.

Sejak 2007, INAP memantau pencapaian hasil pendidikan mulai dari Kelas I. Di tahun 2012, kemampuan yang diukur dalam survei INAP adalah penguasaan domain konten dan kognitif Kelas IV. Pada saat itu ada harapan agar dalam jangka waktu enam tahun, survei INAP telah mencapai satu siklus penuh dari Kelas I hingga Kelas XII.

Di akhir tahun 2017 INAP berubah nama menjadi Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). AKSI merupakan aplikasi berbasis komputer yang dikembangkan oleh Puspendik. AKSI merupakan program pemetaan capaian pendidikan untuk memantau mutu pendidikan secara nasional atau daerah yang menggambarkan capaian kemampuan siswa. Asesmen membantu guru mendiagnosis kemampuan siswa pada topik-topik substansial (Oktora, 2019b). Asesmen dilakukan di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) melalui survei dengan tolok ukur yang juga mengacu pada indikator dalam PISA dan TIMSS.

Dalam Laporan Kinerja Kemendikbud tahun 2020 disampaikan bahwa karena AKM belum dilakukan di tahun 2020 secara nasional akibat Covid-19, maka perhitungan capaian AKM berdasarkan hasil asesmen bidang literasi dan numerasi tahun 2019. Untuk jenjang SD menggunakan data INAP/AKSI, sedangkan jenjang SMP

dan SMA menggunakan data UN (Kemendikbud, 2020: 37).

AKSI dapat dikatakan merupakan PISA versi Indonesia. Bahkan, dalam draf Peta Jalan Pendidikan 2020–2035 disebutkan bahwa AKM (sebagai bagian dari AN) mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi dan numerasi siswa (Arika, 2020). Berdasarkan penilaian AKSI, mayoritas sekolah tidak siap melakukan pengukuran secara mandiri. Sekolah yang dianggap mampu hanyalah institusi yang sudah terakreditasi A. Persentase jumlah sekolah dasar dan menengah dengan akreditasi A baru sekitar 30 persen dari jumlah total sekolah di Indonesia. Penerapannya akan tidak mudah lantaran UN sudah berlangsung lama sehingga budaya pendidikan yang berorientasi hasil mengakar di banyak daerah.

Belajar dari kritik ilmuwan dunia terhadap PISA, Indonesia sudah mengambil langkah berani untuk melakukan asesmen terhadap seluruh sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah. PISA hanya mengambil sampel untuk siswa yang berusia sekitar 15 tahunan, sedangkan AN akan diterapkan untuk siswa di tiga kelompok umur, yaitu 11 tahunan, 14 tahunan, dan 17 tahunan. Besarnya cakupan subjek pengukuran, ditambah sebaran wilayah Indonesia, serta tantangan pandemi dapat mengakibatkan ditundanya pelaksanaan AN.

AN berupaya mengembalikan kewenangan dan tugas untuk mengevaluasi hasil belajar murid kepada guru. Keinginan yang sesuai dengan amanat dan semangat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). UU Sisdiknas mengatur kewenangan untuk melakukan evaluasi hasil belajar siswa ada pada guru. AN tidak sepenuhnya menggantikan UN, dan AN tidak menguji siswa sama sekali. Tujuan AN adalah untuk memotret kondisi sekolah, kondisi sistem pendidikan mulai dari sekolah dan madrasah, daerah, kemudian nasional. Mulai dari progres, kesenjangan antarse-

kolah, antarkelompok siswa, dan antardaerah. Potret diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan intervensi yang asimetris, sesuai dengan kebutuhan. Jika kebutuhannya adalah pelatihan matematika, maka pelatihan tersebut yang akan diberikan. Jika kebutuhannya adalah sarana dan prasarana, maka pemenuhan kebutuhan pendukung tersebut yang diberikan. Potret yang diambil dari AN diharapkan dapat menjadi dasar intervensi yang lebih tepat guna bagi sekolah secara langsung.

Walaupun AN sepertinya akan menjadi jalan tengah untuk mengevaluasi sistem pendidikan di Indonesia, tetapi Miller, Linn, & Gronlund (2009: 6) juga mengingatkan bahwa asesmen yang tidak tepat akan mengakibatkan goyahnya fondasi pendidikan di masyarakat. Sebagai jalan tengah, AN mencoba menjawab tantangan terhadap PISA yang dianggap kurang memperhatikan sejarah panjang dan nilai-nilai budaya negara peserta PISA. Fondasi pendidikan Indonesia akan kembali diperkuat dengan memperhatikan sejarah dan budaya melalui AN.

Kekhawatiran lain adalah bahwa asesmen mendorong munculnya capaian mediator yang mengancam masa depan bangsa. AN dapat mengantisipasi ancaman tersebut dengan: (1) memastikan capaian siswa yang benar-benar terpusat pada siswa; (2) mengidentifikasi kebutuhan intervensi selanjutnya yang belum diinformasikan kepada masyarakat karena memang belum terlihat rapor akhir setiap sekolah; dan (3) mengidentifikasi peluang perbaikan berdasarkan rapor sekolah dengan segera.

Penutup

Perjalanan panjang pelaksanaan evaluasi pendidikan menjadi latar belakang penyelenggaraan Asesmen Nasional (AN). Beragam evaluasi pendidikan skala nasional sudah dimulai lima tahun setelah Indonesia merdeka. Walaupun ada nilai penting sejarah Ujian Nasional (UN), namun semangat mempersiapkan sumber daya

manusia (SDM) unggul berprofil Pancasila menjadi titik penting kesepakatan semua elemen bangsa. Seluruh fraksi di DPR menyepakati usulan penghapusan UN oleh pemerintah.

AN yang menjadi usulan pemerintah terdiri dari tiga bagian, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. AKM diikuti oleh siswa untuk mengukur aspek kognitif melalui literasi membaca dan numerasi. Survei Karakter diikuti oleh siswa dan guru, untuk mengukur sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai sebagai hasil belajar nonkognitif. Survei Lingkungan Belajar diikuti oleh kepala sekolah, untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran.

Hasil AN menjadi cermin atau potret layanan dan kinerja setiap sekolah untuk selanjutnya secara bersama-sama dapat dilakukan refleksi untuk mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Sebelum AN, sistem pendidikan Indonesia sudah beberapa kali dinilai secara nasional, bahkan dibandingkan dengan negara lain. *Indonesian National Assessment Program* (INAP) atau Program Asesmen Pendidikan Nasional yang kemudian diperbaiki menjadi Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) merupakan evaluasi skala nasional yang pernah dilakukan Indonesia.

Penjabaran mengenai berbagai bentuk evaluasi memperlihatkan bahwa AN dapat menjadi salah satu pilihan berdasarkan berbagai pertimbangan. Sudah ada praktik baik yang memperlihatkan bahwa AN tidak sama sekali baru. Sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang dapat memperbaiki penerapan AN yang pada gilirannya juga memperbaiki sistem pendidikan di masa yang akan datang.

Indonesia juga turut berpartisipasi dalam PISA dan TIMSS, dan hasil yang didapat menjadi tantangan tersendiri untuk membuktikan diri di hadapan negara lain di dunia. Walaupun sempat ada kritik terhadap PISA, pemerintah tetap menjadikan PISA sebagai salah satu pembanding dan

awal melangkah dalam perbaikan evaluasi pendidikan. Indonesia yang sangat beragam dan kaya akan nilai budaya nusantara tidak dapat mengabaikan kelebihan tersebut dalam setiap penyusunan kebijakan nasional.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama dan dikawal oleh DPR adalah, *pertama*, jangan sampai AN menjadi versi baru dari UN yang kembali mementingkan hasil akhir, dan bukan proses. *Kedua*, pelaksanaan perdana AN di tahun 2021 harus diikuti dengan evaluasi menyeluruh dan hasilnya disampaikan kepada publik agar muncul rasa kebersamaan dalam memajukan pendidikan nasional. Hasil evaluasi juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa keputusan melaksanakan AN sudah tepat sehingga tidak perlu menunggu dua puluh tahun untuk melakukan perbaikan atau perubahan.

Ketiga, hasil AN benar-benar dapat digunakan sekolah untuk mengembangkan potensinya dan memperbaiki kekurangannya. Harapan dari pelaksanaan AN adalah dapat membantu mengurangi tiga masalah besar di dunia pendidikan, yaitu intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan. Namun, tetap perlu ada antisipasi terhadap ancaman lain yang tidak dapat diperkirakan tetapi kemungkinan dapat terjadi di masa yang akan datang. Salah satunya adalah pandemi yang mengubah metode pembelajaran agar dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Terakhir, pelaksanaan AN dapat menjadi awal dimulainya kemandirian sekolah dalam melakukan evaluasi sesuai amanat UU Sisdiknas.

Daftar Pustaka

- Absawati, H. (2020). Telaah sistem pendidikan di Finlandia: penerapan sistem pendidikan terbaik di dunia jenjang sekolah dasar. *Jurnal Elementary*, 3(2), 64–70. doi: 10.31764/elementary.v3i2.2136

- Adom, D., Mensah, J. A., & Dake, D. A. (2020). Test, measurement, and evaluation: understanding and use of the concepts in education. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 9(1), 109–119. doi: 10.11591/ijere.v9i1.20457
- Albertus, D. K. (2021, Maret 9). Paradoks Asesmen Nasional. *Kompas.id*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/03/09/paradoks-asesmen-nasional/>, pada 3 Juli 2021.
- Arika, Y. (2020, Desember 22). Memetakan Kualitas Pendidikan. *Kompas.id*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/12/22/memetakan-kualitas-pendidikan/>, pada 3 Juli 2021.
- Asrul, Ananda, R., & Rosnita. (2014). *Evaluasi pembelajaran*. Bandung: Citapustaka Media.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2018, Maret 15). Ujian nasional siap digelar 8,1 juta peserta dengan 78 persen berbasis komputer. *bsnp-indoneisa.org*. Diakses dari <https://bsnp-indonesia.org/2018/03/ujian-nasional-siap-digelar-81-juta-peserta-dengan-78-persen-berbasis-komputer/>, pada 3 Juli 2021.
- Braun, H., Kanjee, A., Bettinger, E., & Kremer, M. (2006). *Improving education through assessment, innovation, and evaluation*. Cambridge: American Academy of Arts and Sciences.
- Breakspear, S. (2014). How does PISA shape education policy making? Why how we measure learning determines what counts in education. *Seminar Series 240*. Victoria: Centre For Strategic Education.
- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021, Mei 20). ASPD untuk siswa lulusan luar DIY dan siswa lulusan DIY tahun 2020. *Dikpora.jogjaprov.go.id*. Diakses dari <https://dikpora.jogjaprov.go.id/web/berita/read/ASPD-untuk-siswa-lulusan-luar-DIY-dan-siswa-lulusan-DIY-tahun-2020>
- Hadi, S., & Novaliyosi. (2019). *TIMSS Indonesia (Trends in international mathematics and science study)*. [Prosiding]. Seminar Nasional & Call for Papers Program Studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Tasikmalaya, 19 Januari 2019.
- Herman, T. (2003). TIMSS dan implikasinya terhadap pendidikan matematika di Indonesia. *Mimbar Pendidikan*, 2(XXII), 12–18.
- Indahri, Y. (2016). Moratorium ujian nasional. *Majalah Info Singkat*, VIII(23/I/P3DI/Desember/2016), 9–12.
- Irfany, R. (2019, Desember 13). Partai-partai sepakati penghapusan ujian nasional. *Koran.Tempo.co*. Diakses dari <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/448393/partai-partai-sepakati-penghapusan-ujian-nasional>, pada 3 Juli 2021.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019a). Ujian Nasional Berbasis Komputer. *Kemendikbud.go.id*. Diakses dari <https://unbk.kemendikbud.go.id/>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019b, Maret 22). Ujian nasional siap digelar: 8,3 juta peserta dengan 91 persen berbasis komputer. *Kemendikbud.go.id*. Diakses dari <https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2019/03/ujian-nasional-siap-digelar-83-juta-peserta-dengan-91-persen-berbasis-komputer>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Laporan kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020*. Jakarta: Kemendikbud.
- Mediana. (2021, Januari 21). Kasus Covid-19 terus naik, asesmen nasional akhirnya ditunda. *Kompas.id*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/01/21/pengunduran-pelaksanaan-mesti-dipakai-mengoptimalkan-kajian-legal-dan-teknis/>, pada 3 Juli 2021.
- Miller, M. D., Linn, R. L., & Gronlund, N. E. (2009). *Measurement and assessment in teaching*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Nanang, & Rusman. (2019). Analisis kebutuhan pelatihan standar penilaian berbasis data pemetaan mutu pendidikan (PMP). *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 12(1), 24–37. doi: 10.21831/jpipfip.v12i1.20605

- Napitupulu, E. L. (2018, April 19). Penalaran pada siswa belum diperkuat. *Kompas.id*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/04/19/penalaran-pada-siswa-belum-diperkuat/>, pada 3 Juli 2021.
- Napitupulu, E. L. (2021, Juli 29). Menggugat urgensi asesmen nasional di tengah pandemi. *Kompas.id*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/07/29/menggugat-urgensi-asesmen-nasional-di-tengah-pandemi/>, pada 12 Agustus 2021.
- Nasution, N. (2008). *Evaluasi pembelajaran fisika*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Oktora, D. (2019a, November 27). Pemerintah matangkan rencana menghapus ujian nasional. *Koran Tempo*. Diakses dari <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/447936/pemerintah-matangkan-rencana-menghapus-ujian-nasional>, pada 2 Agustus 2021.
- Oktora, D. (2019b, Desember 14). Pemerintah uji coba metode asesmen pengganti ujian nasional. *Koran Tempo*. Diakses dari <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/448438/pemerintah-uji-coba-metode-asesmen-pengganti-ujian-nasional>, pada 2 Agustus 2021.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). *PISA 2015 results (volume I): excellence and equity in education*. doi: 10.1787/9789264266490-en
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *Country note PISA 2018 result*. Diakses dari https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_IDN.pdf, pada 22 Mei 2021.
- Pancawati, M. B. D. (2019, Mei 2). Lika-liku ujian nasional dan kurikulum pendidikan. *Kompas.id*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/05/02/lika-liku-ujian-nasional-dan-kurikulum-pendidikan>, pada 2 Agustus 2021.
- Postlethwaite, T. N., & Kellaghan, T. (2008). *National assessments of educational achievement*. Paris: The International Institute for Educational Planning.
- Pratiwi, I. (2019). Efek program PISA terhadap kurikulum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(1), Juni 2019, 51–71. doi: 10.24832/jpnk.V4i1.1157
- Pusat Asesmen dan Pembelajaran. (2021). *Asesmen nasional. Lembar tanya jawab*. Jakarta: Pusat Asesmen dan Pembelajaran.
- Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Pendidikan di Indonesia. Belajar dari hasil PISA 2018*. Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Putri, R. S. (2018, Maret 7). 28 sekolah Indonesia di luar negeri terapkan UNBK. *Tempo.co*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1067336/28-sekolah-indonesia-di-luar-negeri-akan-terapkan-unbk/full&view=ok>, pada 2 Agustus 2021.
- Rothner, J. W. M. (1968). Evaluation of learning, in C. E. Skinner (Ed.). *Educational psychology (4th edition)*. New Delhi: Prentice-Hall of India.
- Samekto, F. X. A. (2021, Februari 5). Tentang profil pelajar Pancasila. *Kompas.id*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/02/05/tentang-profil-pelajar-pancasila>, pada 2 Agustus 2021.
- Scriven, M. (1981). *Evaluation thesaurus (3rd edition)*. Inverness: Edgepress.
- Singh, G. (2018). *Concept and purpose of evaluation*. [Materi Kuliah Indira Gandhi National Open University]. Diakses dari <http://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/46038/1/Unit-1.pdf>
- Sjøberg, S. (2015). PISA and global educational governance—a critique of the project, its uses and implications. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*, 11(1), 111–127. doi: 10.12973/eurasia.2015.1310a
- Slameto. (2011). Evaluasi diri sekolah dan monitoring sekolah. *Scholaria*, 1(2), 1–21.
- Stiggins, R. J. (1998). *Classroom assessment for student success. Student assessment series*. Washington, DC: National Education Association.
- Stock, J., Macleod, J., Holland, J., Davies, A., Jennings, P., Richards, J., Hughes, A., Garbett, J., & Cross, M. (1987). *Assessment and evaluation in training. Training technology programme, (Vol. 6)*. Carnforth: Parthenon.

- Strauss, V. (2019). Expert: How PISA created an illusion of education quality and marketed it to the world. *Washington Post*. Diakses dari <https://www.washingtonpost.com/education/2019/12/03/expert-how-pisa-created-an-illusion-education-quality-marketed-it-world/>, pada 2 Agustus 2021.
- Suwarda, T. H. (2019, Desember 11). Ini sejarah ujian nasional di Indonesia. *Mediaindonesia.com*. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/277115/ini-sejarah-ujian-nasional-di-indonesia>, pada 2 Agustus 2021.
- Tripathi, R., & Kumar, A. (2018). Importance and improvements in teaching-learning process through effective evaluation methodologies. *International Journal for Environmental Rehabilitation and Conservation*, IX(2), 07–16. doi: 10.31786/09756272.18.9.2.202
- Uljens, M. (2007). The hidden curriculum of PISA: The promotion of neo-liberal policy by educational assessment. *FERA Congress in Vasa*, 22–23 November 2007, 1–11. Diakses dari http://www.vasa.abo.fi/users/muljens/pdf/the_hidden.pdf
- Wulan, A. R. (2012). *Pengertian dan esensi konsep evaluasi, asesmen, tes, dan pengukuran*. [Materi Kuliah FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia]. Diakses dari http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._BIOLOGI/ANA_RATNAWULAN/pengertian_asesmen.pdf
- Yossihara, A. (2020, Maret 24). Lindungi anak didik, UN 2020 ditiadakan. *Kompas.id*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/03/24/lindungi-anak-didik-un-2020-ditiadakan/>, pada 2 Agustus 2021.